



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

- ☐ INSPEKTORAT JENDERAL
- ☐ SATUAN PENGAWAS INTERNAL
- ☐ BADAN PPSDM KESEHATAN

CATATAN HASIL PRA REVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATKER POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
TAHUN 2018

KEMENTERIAN KESEHATAN RI INSPEKTORAT JENDERAL / SATUAN PENGAWAS INTERNAL / BADAN PPSDM KESEHATAN		Disusun oleh/ Tanggal	Poltekkes Kemenkes Jakarta III
		Direviu oleh/ Tanggal	Warsino
		Disetujui oleh/ Tanggal	Bagian Program dan Informasi
Entitas Akuntabilitas	X	SATKER POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III	
Uraian Catatan Hasil Reviu			
<p>Pelaksanaan Pra Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Kesehatan RI berdasarkan Surat Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan Nomor: PR.03.01/1/7413/2018 tanggal 30 Oktober 2018 perihal Undangan Reviu Laporan Kinerja Tahun 2018 Satuan Kerja di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan</p> <p>Pra Reviu ini tidak memindahkan tanggung jawab penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Kesehatan RI kepada Badan PPSDM Kesehatan. Tanggung jawab penyusunan Laporan Kinerja termasuk kebenaran data sepenuhnya menjadi tanggung jawab satuan kerja masing-masing unit.</p> <p>Berdasarkan hasil Pra reviu tersebut, bersama ini kami sampaikan Catatan Hasil Pra Reviu yang harus di tindak lanjuti sebelum pelaksanaan evaluasi SAKIP (melibatkan masing-masing SPI) sebagai berikut:</p>			
A. Format Laporan Kinerja			
Belum terdapat sistematika penulisan LKj-IP			
B. Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja			
Sudah sesuai			
C. Substansi Laporan Kinerja			
<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada tujuan penyusunan LKj. - Belum ada uraian, tugas pokok dan fungsi sesuai struktur organisasi. - Belum ada uraian keterkaitan antara visi misi poltekkes dengan program PPSDMK dan Nawacita presiden. - Pada Bab III belum terdapat pembahasan tentang perbandingan capaian tahun 2018 dengan 3 tahun sebelumnya dan prediksi capaian sampai dengan tahun 2019 untuk setiap indikator. - Belum ada perbandingan realisasi anggaran tahun 2018 dengan tahun anggaran 2017 serta pagu dan realisasi anggaran per indikator. - Ikhtisar Eksekutif: belum mengungkapkan capaian kinerja SAKIP tahun 2015- 2017. - Belum ada dokumen pendukung pada lampiran. 			
D. Catatan Permasalahan Lainnya			
-			
Koreksi / Perbaikan			
A. Koreksi / Perbaikan yang sudah dilakukan			
B. Koreksi / Perbaikan yang belum dilakukan			

C. Rekomendasi

Satker melakukan perbaikan dan melengkapi semua hasil pra reviu, diantaranya:

- Menambahkan tujuan penyusunan LKj.
- Satker sebaiknya menambahkan uraian tentang tugas pokok dan fungsi sesuai struktur organisasi berdasarkan Permenkes yang ada.
- Satker sebaiknya menambahkan uraian keterkaitan antara visi misi poltekkes dengan program PPSPDM dan Nawacita presiden.
- Satker sebaiknya menambahkan pada Bab III pembahasan tentang perbandingan capaian tahun 2018 dengan 3 tahun sebelumnya dan prediksi capaian sampai dengan tahun 2019 untuk setiap indikator.
- Satker sebaiknya menambahkan perbandingan realisasi anggaran tahun 2018 dengan tahun anggaran 2017 serta pagu dan realisasi anggaran per indikator.
- Satker sebaiknya menambahkan pada Ikhtisar Eksekutif capaian kinerja (hasil evaluasi SAKIP) tahun 2015- 2017.
- Satker disarankan untuk melengkapi lampiran pada LKj seperti PK 2018, rekap data capaian setiap indikator yang telah di otorisasi dan dokumen lainnya yang dirasa perlu.
- Tim SPI Poltekkes Kemenkes Jakarta III diharapkan melakukan reviu terhadap LKj tahun 2018 Poltekkes Kemenkes Jakarta III sebelum disampaikan secara resmi ke unit utama Badan PPSPDM Kesehatan.

Jakarta, 30 November 2018
Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan
Sekertariat Badan PPSPDM Kesehatan



Siti Hajar, SKM. M.Kes
NIP. 197203091999032003

Kabag Program dan Informasi
Sekretariat Badan PPSPDM Kesehatan

Sjamsul Ariffin, SKM.M.Epid
NIP. 196611151989031002

Jakarta, 30 November 2018
Satker : Poltekkes Kemenkes Jakarta III
Pembantu Direktur II



DR. Ni Made Rusmini, SKp, M.Kes.Sp.Kom
NIP. 196205031985032002

Pengendali Teknis,

.....
NIP.

RENCANA TINDAK LANJUT PENYELESAIAN KOREKSI / PERBAIKAN
ATAS CATATAN HASIL PRA REVIU LKJ TAHUN 2018

[illegible]

V = tanggal penyelesaian

Diketahui,
Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan
Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan

Siti Hajar, SKM, M.Kes
NIP. 197203091999892003

Jakarta, 30 November 2018
Penanggung jawab Satker
Pembantu Direktur II
POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III

Dr. Ni Made Riasmini, S.Kp, M.Kes, Sp.Kom
NIP. 196205031985032001



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120

Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7302 Faksimile : (021) 7279 7508

Laman www.bpsdmk.depkes.go.id



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR : HK.02.03/I/002655/2018**

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa unit kerja dan satuan kerja termasuk Unit Pelaksana Teknis menyusun perjanjian kinerja;

b. bahwa Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan menyusun perjanjian kerja sesuai dengan indikator kinerja utama yang disepakati pimpinan satuan kerja dan pimpinan unit kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Indikator Kinerja Utama Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disingkat IKU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : IKU sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan acuan bagi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam menyusun dokumen penetapan kinerja.
- KETIGA : Selain IKU sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, Unit Pelaksana Teknis dapat menyusun indikator kinerja penunjang lainnya.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.03/I.2/001250.1/2016 tentang Indikator Kinerja Utama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan RI di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Oktober 2018

KEPALA BADAN PPSDM KESEHATAN,



Tembusan :

1. Menteri Kesehatan RI;
2. Sekretaris Jenderal Kemenkes RI;
3. Inspektur Jenderal Kemenkes RI;
4. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan
5. Para Kepala Pusat di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan;
6. Para Kepala BBPK di Seluruh Indonesia;
7. Para Kepala Bapelkes di Seluruh Indonesia;
8. Direktur Poltekkes di Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR : HK.02.03/I/ 002655 /2018
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	CONTOH PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	CARA MENETAPKAN TARGET
1	Meningkatnya lulusan tepat waktu	1 Persentase lulusan tepat waktu	%	Persentase jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu sesuai periode masa studi dalam tahun.	Jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu dibagi jumlah mahasiswa yang diterima pada angkatan tersebut x 100 %		PUDIR I	Sub Bag ADAK	Meningkat minimal 10% dari rata-rata persentase peningkatan kelulusan tepat waktu 3 tahun terakhir untuk tingkat masing-masing Poltekkes.
2	Meningkatnya kelulusan uji kompetensi	2 Persentase kelulusan Uji Kompetensi	%	Persentase jumlah mahasiswa yang lulus uji kompetensi yang diselenggarakan secara nasional.	Jumlah mahasiswa yang lulus ujian kompetensi dibagi dengan jumlah mahasiswa yang mengikuti uji kompetensi dikali 100%		PUDIR I	Sub Bag ADAK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan minimal 10% dari rata-rata persentase peningkatan kelulusan UKOM 3 tahun terakhir untuk tingkat masing-masing Poltekkes. 2. Bagi Poltekkes yang baru pertama kali mengikuti UKOM, atau Poltekkes yang 3 tahun terakhir menunjukkan penurunan, target ditentukan minimal sama dengan rata-rata UKOM nasional. 3. Bagi Poltekkes yang baru pertama kali mengikuti UKOM, target ditentukan minimal sama dengan rata-rata UKOM nasional. Untuk Poltekkes yang 3 tahun terakhir menunjukkan penurunan, target ditetapkan minimal sama dengan tahun sebelumnya.
3	Meningkatnya Lulusan dengan IPK ≥ 3.25	3 Persentase lulusan yang mendapatkan IPK ≥ 3.25	%	Persentase lulusan dengan IPK $\geq 3,25$ dari seluruh lulusan	Jumlah lulusan yang mendapatkan IPK $\geq 3,25$ dibagi jumlah seluruh lulusan dikali 100%		PUDIR I	Sub Bag ADAK	Meningkat minimal 10% dari rata-rata persentase peningkatan IPK ≥ 3.25 tiga tahun terakhir untuk tingkat masing-masing Poltekkes.

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	CONTOH PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	CARA MENETAPKAN
4	Meningkatnya pembelajaran berbasis e-learning	4 Persentase Pembelajaran berbasis e-learning	%	Persentase mata kuliah yang diajarkan dengan memanfaatkan e-learning untuk bahan kajian yang bersifat teoritis (teori).	Jumlah MK teori yang memanfaatkan daring dibagi dengan total MK teori pada tahun akademik dikali 100%		PUDIR I	Unit Pengembangan dan Unit IT/ Sub Bag ADAK	Minimal 5 % MK menerapkan e-learning, untuk selanjutnya dikembangkan masing-masing Poltekkes minimal 1% MK per tahun.
5	Meningkatnya penyerapan lulusan di pasar kerja kurang dari 6 bulan	5 Persentase serapan lulusan di pasar kerja kurang dari 6 bulan	%	Persentase penyerapan lulusan T-1 di pasar kerja setelah 6 bulan lulus, bekerja sesuai dengan kompetensinya.	Jumlah lulusan T-1 yang terserap di lapangan kerja setelah 6 bulan lulus (bekerja sesuai dengan kompetensinya dibagi jumlah lulusan periode akademik pada tahun yang sama (T-1) di kali 100%		PUDIR III	Sub Bag ADAK, Unit/Urutan Alumni	Meningkat minimal 10% dari rata-rata persentase serapan lulusan dibawah 6 bulan untuk 3 tahun terakhir pada masing-masing Poltekkes.
6	Meningkatnya kegiatan penelitian oleh dosen	6 Jumlah kegiatan penelitian yang dilakukan dosen dalam 1 tahun	Judul	Jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen selama 1 tahun	Absolut Jumlah penelitian selama 1 tahun		PUDIR I	UNIT PPM	Target ditetapkan berdasarkan minimal rata-rata jumlah judul penelitian 3 tahun terakhir.
7	Meningkatnya publikasi karya ilmiah yang di publikasikan dalam jurnal ilmiah nasional / internasional	7 Jumlah Karya Ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah dalam satu tahun	nilai	Jumlah seluruh karya ilmiah yang dipublikasikan pada tahun berjalan. a. Jenis karya ilmiah yang dipublikasikan Jurnal internasional bereputasi (minimal accepted) : Bobot 5 b. Jenis karya ilmiah yang dipublikasikan Jurnal Nasional terakreditasi (minimal accepted) : Bobot 3 c. Jenis karya ilmiah yang dipublikasikan Jurnal ber-ISSN : Bobot 1	Nilai publikasi = $\frac{(a \times 5) + (b \times 3) + (c \times 1)}{(a+b+c)}$	Yang terpublikasi di jurnal internasional Yang terpublikasi di jurnal nasional terakreditasi = 4 naskah (b=4) Yang terpublikasi di jurnal ber-ISSN = 5 naskah (c=5) Perhitungannya = $(3 \times 5) + (4 \times 3) + (5 \times 1) / (3+4+5) = 2,67$	PUDIR I	UNIT PPM	Meningkat minimal 10% dari rata-rata peningkatan nilai publikasi 3 tahun terakhir untuk tingkat masing-masing Poltekkes.
8	Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dalam 1 tahun	8 Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis wilayah dalam 1 tahun	wilayah	Jumlah pengabdian kepada masyarakat berbasis wilayah binaan yang mendukung program Kemenkes dan bekerjasama dengan pemerintah / pemerintah daerah/swasta/industri/masyarakat yang dilakukan dalam 1 tahun (yang dibuktikan dalam MOU dan laporan)	Absolut jumlah wilayah binaan		PUDIR I	UNIT PPM	Setiap tahun akan menambah minimal 1 wilayah binaan dibandingkan tahun sebelumnya.

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	CONTOH PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	CARA MENETAPKAN
		9 Persentase kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian yang dilakukan dalam 1 tahun	%	Persentase kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian tahun sebelumnya (T-1) yang dilakukan oleh dosen dalam 1 tahun berjalan.	Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tahun berjalan yang berbasis hasil penelitian 1 tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah penelitian tahun sebelumnya dikali 100%		PUDIR I	UNIT PPM	Target ditetapkan berdasarkan minimal rata-rata persentase kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian 3 tahun terakhir.
9	Kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien dan akuntabel	10 Persentase pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional	%	<p>Pendapatan PNBPN merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan sesuai dengan pola tarif, tidak termasuk pendapatan dari Rupiah Murni (RM).</p> <p>Biaya Operasional merupakan seluruh biaya langsung yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat meliputi belanja pegawai, biaya bahan, biaya perjalanan, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa dan biaya langsung lainnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Satker, baik yang sumber dananya berasal dari Rupiah Murni (RM) maupun PNBPN.</p>	Jumlah pendapatan (PNBPN) dibagi dengan jumlah biaya operasional dikali 100 %.		PUDIR II	Sub Bag ADUM	Meningkat minimal 10% dari rata-rata persentase peningkatan rasio pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional 3 tahun terakhir untuk tingkat masing-masing Poltekkes.
		11 Jumlah Pendapatan PNBPN	Rp	Pendapatan PNBPN merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan sesuai dengan pola tarif, tidak termasuk pendapatan dari Rupiah Murni (RM).	Absolut jumlah pendapatan per tahun.		PUDIR II	Sub Bag ADUM	Meningkat minimal 10% dari rata-rata peningkatan jumlah pendapatan PNBPN 3 tahun terakhir untuk tingkat masing-masing Poltekkes.

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	CONTOH PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	CARA MENETAPKAN
		12 Realisasi pendapatan dari optimalisasi aset (khusus satker PKBLU)	Rp	Pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan aset pada satker PKBLU.	Absolut pendapatan optimalisasi aset.		PUDIR II	Sub Bag ADUM	Meningkat minimal 10% dari rata-rata peningkatan realisasi pendapatan dari optimalisasi aset 3 tahun terakhir untuk tingkat masing-masing Poltekkes.
		13 Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan Keuangan BLU (khusus satker PKBLU)	%	<p>Capaian KPI = Persentase Penyelesaian pengembangan system informasi pada tahun 2017 sebagaimana maksud pasal 21 dan 22 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2016 tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Badan Layanan Umum <i>Integrated Online System</i></p> <p>1. BLU mengisi data profil, layanan dan keuangan periode 2015-2018 pada BIOS secara lengkap dan tepat waktu Bobot = 50%</p> <p>2. BLU Mempunyai <i>website</i> yang representative dan <i>up to date</i> = Bobot 20%</p> <p>6. Tersedianya <i>webservices</i> untuk transfer data dari BLU ke Kementerian Keuangan (Bobot 20%)</p>	<p>Persentase =</p> $\frac{[(1 \times 50) + (2 \times 20) + (3 \times 50) + (4 \times 20) + (5 \times 10) + (6 \times 20) + (7 \times 20)]}{190 \times 100 \%}$		PUDIR II	Sub Bag ADUM	Penetapan target kinerja didasarkan sesuai dengan kebijakan PK BLU
10	Layanan Prima	14 Rasio dosen terhadap mahasiswa	Nilai	<p>Dosen tetap adalah Tenaga Pengajar yang telah memiliki SK Jabatan Fungsional Dosen (baik yang sudah sertifikasi dosen maupun belum dan atau memiliki NIDN/NIDK) sesuai dengan data di PDDIKTI.</p> <p>Rentang rasio dan skornya sesuai dengan Permenristek Dikti 1 : 30</p> <p>Sesuai dengan borang BAN PT</p>	Absolut mengikuti data di PDDIKTI untuk tahun berjalan.		PUDIR I	Sub Bag ADAK	Meninjau ketetapan LAMPTKes dan Permendikti
		15 Karya yang diusulkan mendapatkan HKI	Jumlah	<p>Jumlah karya yang diusulkan mendapatkan HKI</p> <p>a. Jumlah karya yang diusulkan x nilai (1)</p> <p>b. Jumlah karya yang mendapatkan HKI x nilai (3)</p>	<p>Total nilai =</p> $\frac{(a \times 1) + (b \times 3)}{(a+b)}$		PUDIR I	UNIT PPM	Meningkat minimal 10% dari rata-rata peningkatan jumlah HKI 3 tahun terakhir untuk tingkat masing-masing Poltekkes.

		16 Persentase jumlah Dosen berkualifikasi S3	%	Proporsi jumlah dosen (yang terdata di PDDIKTI), berkualifikasi S3 (dibuktikan dengan ijazah), termasuk dosen yang sedang menempuh studi S3.	Jumlah dosen yang memiliki kualifikasi S3 dibagi jumlah Dosen pada tahun berjalan dikali 100%		PUDIR II	Sub Bag ADUM	Sesuai dengan Regulasi Pusat,
		17 Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	Penilaian dilaksanakan sesuai dengan standar Permenpan RB Nomor 16 tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik	<p>Cara pengukuran :</p> <p>Kuesioner terdiri dari 14 item yang masing-masing item diskor 1-4 dan hasil akhir berupa nilai rata-rata yang dikategorikan:</p> <p>1: kurang memuaskan</p> <p>2: cukup memuaskan</p> <p>3: memuaskan</p> <p>4: sangat memuaskan</p> <p>IKM = $\frac{(n1 \times 1) + (n2 \times 2) + (n3 \times 3) + (n4 \times 4)}{(n1 + n2 + n3 + n4)}$</p>		PUDIR I	<p>UNIT Penjaminan Mutu</p> <p>Sub Bag ADUM</p> <p>Sub. Bag ADAK</p>	Meningkat minimal 5% dari rata-rata peningkatan peningkatan Index Kepuasan 3 tahun terakhir untuk tingkat masing-masing Poltekkes.
		18 Persentase mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapat bantuan dana pendidikan	%	Jumlah mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah yang menerima bantuan pendidikan dari Poltekkes sesuai dengan kemampuan masing-masing Poltekkes	(Jumlah mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah dibagi dengan jumlah total mahasiswa) dikalikan 100%		PUDIR III	Sub Bag ADAK	5 % dari total Mahasiswa Baru setiap tahun



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR : HK.02.03/1/ 002.655 /2018
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN / BALAI PELATIHAN KESEHATAN

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	CARA MENDAPATKAN/ MENETAPKAN FORMULASI PERHITUNGAN	CARA MENETAPKAN TARGET	PENANGGUNG JAWAB/ SUMBER DATA	
1	Tercapainya pelaksanaan pelatihan yang bermutu	1	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi	orang	Jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk peserta pelatihan SDM Kesehatan yang telah mengikuti pelatihan terakreditasi	menghitung/ kompilasi Jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk peserta pelatihan SDM Kesehatan yang telah mengikuti pelatihan terakreditasi selama tahun 2019	data diperoleh dari total pelatihan yang bersumber dari : 1 Rupiah Murni/PNBD 2 Pelatihan yang diampu oleh BBPPK/Bapelkes	1 Berdasarkan Baseline data minimal 1 tahun 2 Berdasarkan kepada alokasi anggaran yang ditentukan Pusat tersedia di Balai masing asing, dan alokasi peserta latih yang ditentukan dari institusi pengampu	Kabid/kasie diklat
		2	Jumlah peserta TOT dengan nilai akhir $\geq 80,1$	orang	Perbandingan peserta TOT yang memperoleh nilai ujian akhir $\geq 80,1$ dengan total peserta TOT	$\frac{\text{jumlah peserta TOT yang memperoleh dengan nilai akhir } \geq 80,1}{\text{Total Peserta TOT}} \times 100$	Penetapan nilai diperoleh dari akumulasi 1 Pre dan Post 2 hasil ujian komperhensip 3 nilai micro-teaching 4 Sikap & Prilaku 5 Rujukan PERKA LAN No. 18 tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan tingkat II	Berdasarkan Baseline data minimal 1 tahun sebelumnya	Kabid/kasie diklat
		3	Persentase peserta pelatihan (latsar dan kepemimpinan) dengan nilai akhir $\geq 80,1$	%	Perbandingan peserta pelatihan (latsar dan kepemimpinan) yang memperoleh nilai akhir $\geq 80,1$ dengan total peserta pelatihan latsar dan kepemimpinan.	$\frac{\text{jumlah peserta pelatihan (latsar dan kepemimpinan) dengan nilai akhir } \geq 80,1}{\text{total peserta pelatihan (latsar dan kepemimpinan)}} \times 100$	Sesuai PERKA LAN No. 18 tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan tingkat II	Berdasarkan Baseline data minimal 1 tahun sebelumnya	Kabid/kasie diklat
		4	Persentase peserta pelatihan teknis dan fungsional dengan nilai akhir ≥ 75	%	Perbandingan peserta pelatihan teknis dan fungsional yang memperoleh nilai akhir ≥ 75 dengan total peserta pelatihan	$\frac{\text{Jumlah peserta pelatihan teknis dan fungsional dengan nilai akhir } \geq 75}{\text{total peserta teknis dan fungsional}} \times 100$	Nilai akhir pelatihan diperoleh dari akumulasi penilaian selama proses pembelajaran dan/atau ujian hasil komprehensif	Berdasarkan Baseline data minimal 1 tahun sebelumnya	Kabid/kasie diklat
		5	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Non Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi	orang	Jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk peserta pelatihan SDM Non Kesehatan yang telah mengikuti pelatihan terakreditasi	menghitung/ kompilasi Jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk peserta pelatihan SDM non Kesehatan yang telah mengikuti pelatihan terakreditasi selama tahun 2019	data diperoleh dari total pelatihan yang bersumber dari : 1 Rupiah murni / FNBP 2 Pelatihan yang diampu oleh BBPPK/Bapelkes	Berdasarkan kepada alokasi anggaran yang ditentukan Pusat tersedia di Balai masing asing, dan alokasi anggaran dari institusi yang diampu	Kabid/kasie diklat

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	CARA MENDAPATKAN/ MENETAPKAN FORMULASI PERHITUNGAN	CARA MENETAPKAN TARGET	PELAKSANAAN / SUMBER DATA	
		6	Persentase widyaiswara yang judul karya tulisnya dipublikasikan	%	Perbandingan widyaiswara yang membuat karya tulis telah dipublikasikan dengan total widyaiswara	<div>Jumlah widyaiswara yang karya tulisnya telah dipubiikasikan x 100</div> <div>jumlah total widyaiswara selama tahun 2019</div>	data diperoleh dari Jumlah karya Tulis ilmiah yang telah ditulis oleh widyaiswara dan dipublikasikan di Media Informasi baik cetak (ISBN) maupun online	1 Berdasarkan Baseline data minimal 1 tahun sebelumnya 2 Berdasarkan jumlah WI yang mempunyai potensi	Kabid/kasie diklat
		7	Persentase widyaiswara yang melakukan kajian proses pembelajaran	%	Perbandingan widyaiswara yang melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan pelatihan / proses pembelajaran dengan jumlah total widyaiswara yang menjadi pengenali diklat	<div>Jumlah widyaiswara yang melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan pelatihan / proses pembelajaran</div> <div>100</div> <div>jumlah total widyaiswara yang menjadi pengendali diklat tahun 2019</div>	data diperoleh dari : Laporan hasil evaluasi pelaksanaan pelatihan / proses pembelajaran selama yang bersangkutan menjadi pengendali Pelatihan	1 Berdasrkan Baseline data minimal 1 tahun sebelumnya 2 Berdasarkan jumlah WI yang mempunyai potensi	Kabid/kasie diklat
		8	Nilai Akreditasi Institusi	nilai	Nilai akreditasi yang diperoleh dari penilaian akreditasi oleh pusat pelatihan SDM Kesehatan	Sesuai borang akreditasi institusi pelatihan	Ditetapkan oleh Puslat SDMK		Kabid/kasie diklat



KERALA BADAN PPSDM KESEHATAN,